

OPTIMALISASI PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS) VIA MEDIA DARING DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Joko Susanto

Advokat, Sekretaris Forum Wartawan Kejaksaan (FORWAKA) Provinsi Jawa
Tengah
email: [bungjoko69@gmail.com](mailto:bunjoko69@gmail.com)

Okky Andaniswari

Lembaga Bantuan Hukum Rumah Pejuang Keadilan Indonesia
email: okkyandaniswari21@gmail.com

A. Pendahuluan

Dalam hal mencapai tujuan menekan angka kriminalitas, tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum lainnya yang terjadi di seluruh pelosok daerah khususnya di Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah tentu tidak cukup hanya melalui penindakan, melainkan juga perlunya mengefektifkan fungsi pencegahan dengan tujuan untuk mendorong masyarakat ikut terlibat, dalam mengimplementasikan fungsi pencegahan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memang belum maksimal, terbukti masih banyaknya tindak pidana yang menyeret sejumlah pejabat, tak lepas di instansi kejaksaan itu sendiri.

Seharusnya di era digital yang semua serba terbuka dan lebih mudah untuk memaksimalkan pencegahan. Pencegahan itu memang perlu agar kedukaan terhadap instansi kejaksaan tidak terulang lagi, sebagaimana publik sudah mengetahui adanya oknum di kejaksaan terlibat pidana. Seperti oknum Staf Tata Usaha Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang⁴⁷, berinisial AN, terjerat perkara korupsi pengelapan uang denda dan biaya perkara sidang bukti pelanggaran bermotor (tilang) dalam kurun waktu 2015-2018 di Kejari Rembang dan telah di vonis pada 18 Desember 2019 dengan pidana 4 (*empat*) tahun dan 8 (*delapan*) bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang.

⁴⁷ *Arsip Berita Jawa Pos Radar Semarang*

Perkara lain menjerat oknum jaksa Kejari Surakarta, berinisial SS, dimana pada 19 Agustus 2019 dianggap telah menerima suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPK) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, bahkan ia telah divonis 4 (*empat*) tahun penjara. Mirisnya lagi berlanjut pada tiga oknum pegawai Kejati Jateng. Ada Mantan Asisten Tindak Pidana Khusus, berinisial KSN, SH, MH telah di vonis 2 (*dua*) tahun dan 6 (*enam*) bulan penjara, kemudian Mantan Kasi Penuntutan, berinisial MRE telah divonis 1 (*satu*) tahun dan 10 (*sepuluh*) bulan penjara, sedangkan oknum Staf TU, berinisial BCN divonis 1 (*satu*) tahun penjara. Ketiganya di vonis 22 April 2020 karena dianggap korupsi menerima suap dari oknum pengacara berinisial ASN yang merupakan kuasa hukum pengusaha SS. Terbaru oknum pegawai Tata Usaha Kejari Kota Semarang berinisial SF, diduga membawa narkoba jenis Pil Koplo atau obat kode G ke Lapas Kedungpane Semarang pada 2 Juli 2020 lalu, kasusnya masih tahap pemeriksaan Jaksa Pengawas baik di Kejari Kota Semarang maupun Asisten Pengawasan Kejati Jawa Tengah.

Ditambah memasuki masa Pandemi Covid-19, tentu langkah-langkah pencegahan akan semakin terganjal. Apalagi dengan adanya wacana dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, Nadiem Makarim⁴⁸ yang merencanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akan diterapkan secara permanen dan hybrid yang dianggap sebagai bentuk adaptasi teknologi. Wacana ini disampaikan Nadiem saat rapat kerja bersama dengan Komisi X DPR RI, pada Kamis (2/7/2020). Sekalipun wacana itu tidak disepakati Komisi X DPR RI, yang pertama ditolak oleh Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, disampaikan kepada awak media di Jakarta pada Jumat (3/7/2020). Menurut Syaiful Huda, pembelajaran jarak jauh hanya memenuhi dua dari enam aspek pembelajaran siswa dengan guru. Enam aspek tersebut adalah nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni berdasarkan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2013.

⁴⁸<https://news.detik.com/berita/d-5079600/komisi-x-tolak-pjj-permanen-di-sd-sma-ingatkan-aspek-pembelajaran>, (diunduh 9 Juli 2020).

Tentu adanya wacana itu instansi kejaksaan ditambah adanya pandemic Covid-19, khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah perlu memiliki kekhawatiran. Pasalnya salah satu programnya Jaksa Masuk Sekolah (JMS) bisa-bisa dibubarkan seperti program Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P). Padahal program Jaksa Masuk Sekolah sangat bermanfaat untuk memperkaya khasanah pengetahuan terhadap para pelajar khususnya pemahaman akan hukum dan perundang-undangan serta menciptakan generasi baru yang taat hukum. Melalui tulisan ini penulis mencoba memberikan gagasan akademis dengan judul “*Optimalisasi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) Melalui Media Daring Ditengah Pandemi Covid-19*”.

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah Optimalisasi Program Jaksa Masuk Sekolah Ditengah Pandemi Covid-19?
2. Bagaimanakah Respon dan Saran Masyarakat atas Penerapan Program Jaksa Masuk Sekolah yang Selama Ini Berlangsung?

C. Pembahasan

1. Optimalisasi Program Jaksa Masuk Sekolah Ditengah Pandemi Covid-19

Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) merupakan program kejaksaan yang dibentuk sebagai salah satu rangkaian pencegahan tindak pidana. Terbentuknya program ini disesuaikan dengan fungsi pencegahan yang melekat didalamnya yaitu berkampanye atau bersosialisasi. Jaksa Masuk Sekolah (JMS) menuntut jaksa agar lebih berperan aktif di masyarakat melalui tahap pendekatan kepada pelajar. Bentuk kegiatan yang diberikan dalam program ini, berupa penerangan hukum yang diaplikasikan melalui penyuluhan hukum di sekolah-sekolah mulai SD, SMP hingga SMA. Penerangan hukum ini diharapkan mampu menjadi sebuah proses pembentukan karakter anak bangsa dalam menumbuhkan moral bangsa yang tertanam pada jiwa anak bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila

sehingga kedepannya terbentuk anak bangsa yang berkarakter nasionalis dan anti korupsi.

Dengan adanya penerapan Jaksa Masuk Sekolah (JMS), memang menunjukkan capaian yang cukup baik, sebagaimana data Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada 2015⁴⁹, telah berhasil melaksanakan program JMS di sejumlah daerah, mencakup 36 Sekolah Dasar (SD), 145 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 429 Sekolah Menengah Atas (SMA), tentu di tahun 2016 hingga 2020 ada capaian yang lebih baik lagi, terbukti masih di Tahun 2015 sudah berhasil melibatkan 557 sekolah dan 211.252 pelajar. Program JMS tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun pelaksana programnya adalah para Jaksa fungsional, pakar, psikolog, dan pemuka masyarakat, beberapa topik materi yang diangkat diantaranya ada bahaya penyalahgunaan narkoba, korupsi, cyber bullying, cyber terorisme, dan kekerasan seksual.

Melihat topik materi yang diangkat dalam program Jaksa Masuk Sekolah tidak jauh beda dengan yang diangkat oleh guru Bimbingan dan Konseling (BK). Dengan demikian sangat tepat dimasa Pandemi Covid-19 adanya kolaborasi instansi kejaksaan dengan sekolah, yang secara spesifik bekerjasama dengan guru Bimbingan Konseling. Dalam hal ini juga bisa dilakukan kerjasama dengan Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN) maupun Perkumpulan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Indonesia (MGBKI).

Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN)⁵⁰ adalah organisasi profesi di Indonesia yang beranggotakan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Awalnya organisasi ini bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) yang didirikan pada tanggal 17 Desember 1975. Sedangkan Musyawarah

⁴⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5811e7e67db0b/kejaksaan-agung-gelar-program-jaksa-masuk-sekolah/>, (diunduh 9 Juli 2020).

⁵⁰ <https://www.abkin.org/page/sejarah-abkin.html> (diunduh 9 Juli 2020)

Guru Bimbingan dan Konseling Indonesia (MGBKI).⁵¹ adalah organisasi profesi guru bimbingan dan konseling di Indonesia yang bersifat independen yang diinisiasi sejak tahun 2007 oleh guru-guru bimbingan dan konseling se-Indonesia yang tergabung dalam wadah Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) jenjang pendidikan (SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK), mereka bersepakat membentuk suatu wadah organisasi profesi guru bimbingan dan konseling di tingkat Nasional/Pusat dengan nama Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Nasional (MGBK Nasional dan/atau MGBKI).

Tidak bisa dipungkiri antara Jaksa Masuk Sekolah dan guru Bimbingan Konseling (BK) memang ada kesamaan dari sisi topik materi yang disampaikan, sehingga perlu usaha saling kerjasama. Bagaimanapun pelayanan Bimbingan dan Konseling⁵² bukan hanya dilakukan oleh tenaga profesional BK, namun juga harus diterapkan oleh tenaga pengajar dalam upaya untuk membantu siswanya yang ahli dalam bidang akademis maupun non akademis. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan oleh sekolah yakni *Learning Based Guidance Counseling*. Untuk itulah sangat tepat apabila terjadi kolaborasi yang baik, tentunya dengan memanfaatkan media daring selama Pandemi Covid-19.

Sebagaimana kita ketahui elemen masyarakat merupakan pilar utama dalam mengawal penegakkan hukum maupun pencegahannya. Dalam hal ini masyarakat menjadi pilar utama disebabkan karena masyarakat sangat dekat dengan keberadaan kejahatan itu. Melalui tulisan ini masyarakat yang dimaksud adalah guru Bimbingan Konseling maupun para pelajar. Kedekatan masyarakat ini disebabkan karena kejahatan tercipta akibat penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat tentu lebih mengetahui siapa dan kapan saja terjadinya tindak pidana. Oleh karenanya, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memerlukan bantuan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam mengawal pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi di Jawa Tengah. Keterlibatan

⁵¹<http://www.mgbkindonesia.org/aG9tZWRLcGFuI3BhZ2Uja29udGVuI3BhZ2Uja29udGVuI3BhZ2UjMg> (diunduh 9 Juli 2020)

⁵²<https://www.kompasiana.com/dewiaulahikmah/5a24979fcf78db1e7b459173/pentingnya-pembelajaran-berbasis-bimbingan-konseling> (diunduh 10 Juli 2020)

masyarakat dalam hal ini yaitu ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana, yang nantinya bisa dibekali melalui proses pembelajaran dan materi-materi yang diberikan dalam program Jaksa Masuk Sekolah.

Saat ini semua sekolah di Indonesia melakukan pembelajaran secara daring (*online*) yang bertujuan untuk pencegahan penyebaran virus korona (Covid-19). Langkah materi di masa Pandemi Covid-19 yang dapat diberikan kepada para pelajar demi mendukung program Jaksa Masuk Sekolah tentu juga dapat dilaksanakan melalui aplikasi Zoom atau bisa juga melalui aplikasi *Google Classroom*, dan *Hangouts Meet-Google Meet*.

Menurut ulasan beberapa media, aplikasi *Zoom*⁵³ merupakan solusi *Work From Home* (WFH) yang sedang digalakkan dalam bulan ini. Aplikasi milik perusahaan Zoom Video Communications yang berpusat di San Jose, California ini menyediakan layanan konferensi jarak jauh dengan menggabungkan konferensi video, pertemuan daring, obrolan, hingga kolaborasi seluler dimaksimalkan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Di sisi lain masih ada saja yang menganggap bahwa pembelajaran daring adalah sesuatu yang berat. Hal ini dikarenakan ada nya permasalahan koneksi daring termasuk factor tingkatan user pada Aplikasi Zoom sebagai pengguna *basic* dengan batasan durasi maksimal 40 menit dalam satu sesi meeting. Atau tingkatan lisensi *professional user*. Yang tentunya ada biaya bulanan atau tahunan dengan durasi maksimal perhari selama 24 (*dua puluh empat*) jam. Selain itu juga ada factor karena tidak terbiasa dan malas mencobanya.

Namun demikian pembelajaran daring bukanlah sesuatu yang baru karena sudah banyak melakukannya. Tentu akan menjadi lebih baik, apabila ada surat edaran pimpinan Kejaksaan Agung, maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang menjadikan program daring menjadi solusi keadaan saat ini, untuk memaksimalkan dan menjalankan Program Jaksa Masuk Sekolah. Belajar atau mencoba sesuatu yang baru memang tidak mudah. Manusia cenderung melakukan sesuatu yang sudah biasa dilakukannya. Karena sesuatu yang biasa sudah menjadi auto dalam kesehariannya.

⁵³ <https://lldikti5.ristekdikti.go.id/home/detailpost/kuliah-daring> (diunduh 10 Juli 2020)

Tentu apabila digalakkan secara menyeluruh kepada sekolah di 35 (*tiga puluh lima*) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, dalam jangka 2 (*dua*) bulan rutin, program Jaksa Masuk Sekolah akan berjalan maksimal dan terlaksanakan dengan baik. Karena dalam 1 (*satu*) hari bisa dilakukan 2 (*dua*) hingga 3 (*tiga*) sekolah dilakukan oleh 1 (*satu*) jaksa. Hanya saja keseluruhannya itu bergantung pada pengguna itu sendiri. Bagi sebagian orang⁵⁴, menganggap pembelajaran online itu menyenangkan, dan tentunya ini disesuaikan dengan bidang pembelajaran tertentu. Sebaliknya, tidak semua bidang pembelajaran itu terasa nyaman saat digunakan dengan online. Hal ini lebih kepada kepribadian, seperti pembelajaran akhlak, tauhid, dan lain sebagainya.

Namun demikian, pembelajaran daring dengan aplikasi *Zoom* dinilai positif, setidaknya, ini membuka sebuah pengetahuan baru dan modifikasi baru dalam dunia kejaksaan, dimana adanya interaksi antara jaksa dan siswa dalam jarak yang tidak berdekatan, melalui program daring Jaksa Masuk Sekolah.

2. Respon dan Saran Masyarakat Atas Penerapan Program Jaksa Masuk Sekolah yang Selama ini Sudah Berlangsung

Untuk menjawab bagian ini penulis melakukan wawancara dengan lima informan. Para informan tersebut meliputi guru, wartawan, organisasi alumni kampus keguruan, dan pemerhati pendidikan. Secara rinci penulis uraikan sebagai berikut⁵⁵:

| No | Nama Informan | Jabatan | Alamat Kantor |
|-----------|-------------------------|---|--|
| 1 | Tulus Wardoyo, SPd.,MPd | Koordinator Program Cyber Counseling Lembaga Bantuan Hukum Rumah Pejuang Keadilan Indonesia | Gedung Debora-Ong, Jalan Kenconowungu III, No. 18-B, Lantai II, Karangayu, Semarang Barat, Kota Semarang, Jateng |
| 2 | Dadang Dwi Pratama, SPd | Sekretaris Forum Wartawan Komisi Yudisial Jawa Tengah Periode 2017-2018 | Jalan Pamularsih, Bojongsalaman, Kota Semarang, Jateng. |

⁵⁴ <https://rezalubis.com/pembelajaran-daring-dengan-aplikasi-zoom/> (diunduh 10 Juli 2020)

⁵⁵ Nama-Nama Informan yang Dijadikan Obyek Wawancara untuk Mengetahui Respon Masyarakat Atas Judul Bahasan Penulis.

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|
| 3 | Umi Falikha, SPd | Guru BK SMK Negeri 1 Mesuji Raya | Kemang Indah, Mesuji, Palembang, Sumsel. |
| 4 | Wiwin Setyawan, SPd.,Gr | Guru BK SMK Negeri 1 Demak | Jl. Trenggono, No. 87, Katonsari, Kab. Demak, Jateng. |
| 5 | Sasetya Bayu Effendi, SPd.,SH | Sekretaris IKA UPGRIS Cabang Provinsi Sumut | Jalan Datuk Kabu, Pasar Tiga, Medan Tembung, Sumatera Utara |

Koordinator Program Cyber Counseling Lembaga Bantuan Hukum Rumah Pejuang Keadilan Indonesia, Tulus Wardoyo, SPd.,MPd mengatakan bahwa⁵⁶:

“Adanya Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) sangat bermanfaat untuk menumbuhkembangkan kesadaran hukum bagi masyarakat secara umum dan pelajar secara khusus. Dan para pelajar memang seharusnya mendapat ilmu hukum sejak dini. Program JMS nantinya bisa sekaligus untuk mengenalkan produk hukum seperti undang-undang serta mengenal keakraban lembaga Kejaksaan dan tupoksinya di kalangan pelajar” (Wawancara tanggal 9 Juli 2020)

Tulus Wardoyo, yang juga Guru Bimbingan dan Konseling (BK) SMA Negeri 1 Semarang ini mengatakan, berjalannya Program JMS juga bisa berfungsi sebagai penegakan hukum, dalam hal melakukan fungsi preventif yakni mencegah terjadinya kejahatan dengan melakukan penerangan hukum. Ia melihat sejumlah materi yang disampaikan tidak jauh berbeda dengan Guru Bimbingan Konseling seperti materi potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang transaksi elektronik UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik.

“Kami melihat Program JMS ini merupakan program kejaksaan agung yang dicanangkan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di tingkat SD, SMP hingga SMA, yang diterapkan secara intensif, tentu kami

sangat mengapresiasi adanya program JMS tersebut. Dengan pemahaman hukum sejak dini akan membantu proses pembentukan karakter anak bangsa yang berbasis hukum, harapannya selama Pandemi Covid-19 bisa terjadi kerjasama antara ABKIN maupun MGBK, atau dengan guru BK di setiap sekolah”

Sekretaris Forum Wartawan Komisi Yudisial Jawa Tengah Periode 2017-2018, Dadang Dwi Pratama, SPd, menyampaikan bahwa⁵⁷:

“Jaksa Masuk Sekolah (JMS) diharapkan dapat mengantisipasi para pelajar tidak terjerumus pada penggunaan narkoba dan obat berbahaya. Dengan begitu anak-anak sekolah agar mereka semakin paham dan peduli tentang aturan UU yang berlaku. Dalam pemaparan materinya juga disampaikan langsung oleh jaksa sehingga memberikan edukasi kepada para pelajar tentang kesadaran taat hukum dan membentengi generasi bangsa dari persoalan hukum” (Wawancara tanggal 9 Juli 2020)

Dadang Dwi Pratama, menilai penerapan Program JMS juga berfungsi untuk mengenalkan siswa pada institusi kejaksaan sebagai pengacara negara. Tidak hanya itu, JMS juga memberikan materi hukum kepada para siswa agar dapat mengenal dan mengetahui tentang hukum serta bahaya Narkoba, maupun penerapan UU ITE.

“Usia pelajar merupakan generasi muda yang harus mendapatkan perhatian khusus untuk meraih cita-cita. Sehingga perlu dukungan dan contoh yang baik dari lingkungan. Salah satunya yaitu contoh adanya jaksa masuk ke sekolah, sehingga bisa sebagai salah satu contoh aparat penegak hukum di Indonesia”

Guru Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 1 Mesuji Raya, Palembang, Umi Falikha, SPd juga memandang yang sama. Ia memberikan gambaran bahwa⁵⁸:

“Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) sangat tepat apabila ada Kerjasama antara kejaksaan dengan guru Bimbingan dan Konseling, dengan begitu bisa sejalan dengan salah satu motto kejaksaan, Kenali Hukum Jauhi Hukuman khususnya pada para siswa. Pemberian edukasi melalui program JMS bisa menjadi upaya pencegahan yang efektif, bagi generasi muda” (Wawancara tanggal 9 Juli 2020)

Menurut Umi Falikha, materi antara guru Bimbingan dan Konseling tidak jauh berbeda dengan program JMS, yang membedakan hanya langsung diberikan oleh seorang jaksa. Dengan demikian penyuluhan hukum itu bisa menjadi bentuk pencegahan tindak kejahatan di masyarakat. Di mulai dari sekolah dengan sasaran usia pelajar.

“Para siswa masuk dalam usia yang rentan dengan tindak kriminal. Biasanya materi yang diberikan dalam Program JMS tentang pencegahan narkoba, bullying, hingga korupsi. Ada juga pengenalan proses hukum agar anak sejak dini sudah sadar hukum,”

Guru Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 1 Demak, Wiwin Setyawan, SPd.,Gr juga memandang bahwa⁵⁹:

“Dengan adanya penerapan Program Jaksa Masuk Sekolah, maka murid sudah mulai dikenalkan dan diajari tentang hukum. Ini penting supaya ketika ada persoalan di lingkungannya, maka para siswa sudah tahu prosedur hukumnya. Selain itu bisa memberi informasi hukum pada orang lain di lingkungan rumahnya,” (Wawancara tanggal 10 Juli 2020)

Wiwin Setyawan melihat tujuan program JMS untuk pengenalan serta pembinaan hukum sejak dini, agar anak-anak tidak terjerumus dalam pelanggaran hukum akibat tindakan kriminal dan narkoba.

“Bagaimanapun Program JMS tetap haru berjalan ditengah Pandemi Covid-19, dengan demikian apapun alasannya program JMS harus tetap berjalan. Kami sarankan ditengah Pandemi Covid-19 ini untuk memaksimalkan programnya bekerjasama dengan guru Bimbingan dan Konseling”

Sekretaris Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) Cabang Provinsi Sumut, Sasetya Bayu Effendi, SPd., S.H., menyatakan bahwa⁶⁰:

“Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) harus tetap berjalan, meskipun di masa Pandemi Covid-19, dengan demikian program tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan oleh para pelajar untuk mengisi kesibukannya selama proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)” (Wawancara tanggal 10 Juli 2020)

Sasetya Bayu Effendi, mengusulkan agar para jaksa memanfaatkan media daring baik melalui Zoom maupun Google Clasroom, dengan begitu bukan hanya sidang-sidang dan penyerahan berkas perkara yang dilakukan daring melainkan juga dilakukan pencegahan melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang nantinya dimaksimalkan melalui daring.

“Kalau diterapkan daring maka perlunya inovasi materi-materi yang lebih bagus, tentunya dengan kolaborasi Bersama guru Bimbingan dan Konseling, maupun ABKIN dan MGBKI”

Jaksa Agung Republik Indonesia Ke-23, Dr (Hc). Muhammad Prasetyo, pada Jumat 29 September 2017, menyampaikan keinginannya agar program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dapat diterapkan dalam kurikulum anti-korupsi untuk siswa

di SMP dan SMA. Dengan demikian bisa bertujuan untuk memberikan arahan, pendidikan, pemahaman tentang hukum kepada para peserta didik sejak usia dini. Muhammad Prasetyo⁶¹ juga berharap siswa tidak hanya mengetahui dan memahami, tetapi juga patuh dan menaati hukum. Sehingga jika nanti mereka punya posisi dan kedudukan bisa membentengi diri dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum, terlebih lagi dari korupsi.

“Pemahaman hukum penting diterapkan sejak dini di sekolah. Kalau mereka sudah memahami, mengetahui, diharapkan akan patuh dan menaati hukum,”kata Muhammad Prasetyo saat menandatangani nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Tahun 2016-2019, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis 28 September 2017.

Sedangkan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, sebagaimana informasi Instagram resmi bidang Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jateng, tercatat untuk program Jaksa Masuk Sekolah (SMA) di tingkat SMA sederajat terakhir dilakukan di SMK Theresiana Semarang pada Rabu, (26/2/2020), hadir sebagai narasumber adalah Kasi Penerangan Hukum Kejati Jateng, Bambang Tejo, SH, dan Sunari, SH.,MH. Materi yang dibawakan tentang *“Pengenalan kejaksaan, pengenalan hukum, peran generasi muda dalam penegakkan hukum, penggunaan internet secara bijak dan bahaya radikalisme”* diikuti 52 siswa dan sejumlah guru-guru.

Berlanjut ditingkat mahasiswa, tepatnya diadakan di STIKES ST Elisabeth Semarang, dilaksanakan pada Senin, (9/3/2020). Hadir sebagai narasumber adalah Kasi Penerangan Hukum Kejati Jateng, Bambang Tejo, SH, dan Sunari, SH,MH, ditambah Yuni Prawesti, SH. Adapun materi yang disampaikan tentang *“Pengenalan kejaksaan, peran generasi muda dalam penegakan hukum, hoax dan peradilan anak serta internet sehat”* diikuti 100 mahasiswa dan para dosen.

⁶¹ <https://m.liputan6.com/news/read/3113357/m-prasetyo-ingin-program-jaksa-masuk-sekolah-ada-di-kurikulum> (diunduh 10 Juli 2020)

D. Penutup

1. Optimalisasi Program Jaksa Masuk Sekolah Ditengah Pandemi Covid-19 menggunakan aplikasi Zoom dalam pemberian materi adalah pilihan semata. Masing-masing aplikasi untuk pembelajaran memang memiliki ciri dan kekurangan masing-masing. Dengan demikian agar Program JMS bisa maksimal dan tetap berjalan di masa Pandemi Covid-19 harus bisa menyesuaikannya dengan kemampuan peserta didik dan kesesuaian materi pembelajaran. Penulis memiliki saran sebaiknya Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah lebih komunikatif dan intensif dengan besinergi antara semua *stakeholder* terkait dalam melaksanakan upaya-upaya pencegahan dalam rangka meningkatkan peranan memberantas tindak pidana korupsi. Tentunya diperlukan kerjasama yang terjalin dengan berbagai lini bidang bukan hanya dalam hal penindakan tapi juga dalam hal pencegahan.
2. Respon dan Saran Masyarakat atas Penerapan Program Jaksa Masuk Sekolah yang Selama ini Sudah Berlangsung secara garis besar sepakat penerapan Program JMS tetap berlangsung meskipun ditengah Pandemi Covid-19, tentunya jaksa harus lebih kreatif dalam hal materi-materi yang akan disampaikan, agar lebih maksimal juga disarankan bekerjasama dengan guru Bimbingan Konseling. Bisa juga dilakukan kerjasama dengan kerjasama dengan Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN) maupun Perkumpulan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Indonesia (MGBKI).

DAFTAR PUSTAKA

- <https://news.detik.com/berita/d-5079600/komisi-x-tolak-pjj-permanen-di-sd-sma-ingatkan-aspek-pembelajaran>, (diunduh 9 Juli 2020).
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5811e7e67db0b/kejaksaan-agung-gelar-program-jaksa-masuk-sekolah/>, (diunduh 9 Juli 2020).
- <https://www.abkin.org/page/sejarah-abkin.html> (diunduh 9 Juli 2020)
- <http://www.mgbkindonesia.org/aG9tZWRlcGFuI3BhZ2Uja29udGVuI3BhZ2Uja29udGVuI3BhZ2UjMg> (diunduh 9 Juli 2020)
- <https://www.kompasiana.com/dewiaulahikmah/5a24979fcf78db1e7b459173/pentingnya-pembelajaran-berbasis-bimbingan-konseling> (diunduh 10 Juli 2020)
- <https://l1dikti5.ristekdikti.go.id/home/detailpost/kuliah-daring> (diunduh 10 Juli 2020)
- <https://rezalubis.com/pembelajaran-daring-dengan-aplikasi-zoom/> (diunduh 10 Juli 2020)
- <https://m.liputan6.com/news/read/3113357/m-prasetyo-ingin-program-jaksa-masuk-sekolah-ada-di-kurikulum> (diunduh 10 Juli 2020)